

ABSTRAK

Notaris di dalam praktiknya, terkadang dihadapkan pada situasi dimana dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang merupakan pejabat publik, diminta oleh penghadap atau klien untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW). Namun Notaris sering pula menerima kenyataan, bahwa penghadap atau klien yang datang untuk membuat SKW mempunyai golongan campuran. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah bagaimana peran Notaris dalam pembuatan SKW terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia dan apa kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan SKW di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan SKW terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia, serta menganalisa kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan SKW di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan dalam pembuatan SKW, untuk beberapa golongan masyarakat di Indonesia, seperti golongan Eropa dan golongan Tionghoa secara rutin telah dan hingga kini masih dibuat oleh para Notaris. pembuatan SKW bagi Warga Negara Indonesia yang terkendala karena percampuran etnis atau golongan bisa disiasati oleh Notaris dengan membuat Akta Notaris, dimana telah sama-sama dipahami bahwa akta Notaris tidak membedakan golongan atau etnis. Hasil penelitian berikutnya menjelaskan kendala Notaris dalam pembuatan SKW, yang salah satunya adalah Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan SKW di Indonesia.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris, dan Surat Keterangan Waris.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

ABSTRACT

Notaries as Public Officer have the authority to make Deed, one of them called Letter of Inheritance. In practice, it's often requested by the customer or client who is an Indonesian citizen by descent. The question that arises is how is the role of the notary in making Letter of Inheritance related to the existence of classification of population in Indonesia and what are the obstacles experienced by notaries in making the letter of inheritance. This study aims to analyse the role of the notary in making letter of inheritance related to the population classification in Indonesia, as well as analysing the constraints experienced by notaries in making this letter. This research is an empirical juridical legal research, namely legal research concerning the enforcement or implementation of normative legal provisions in real behaviour for every legal event that occurs in society. The collection of legal material is conducted through interviews with several parties related to the problem under study and collecting data through the study of legislation that is related to the problem under study. The results of the study explained that in the making of letter of inheritance, for several groups of people in Indonesia, such as the European and Chinese groups routinely have been and still are made by notaries. The making of letter of inheritance for Indonesian citizens who are constrained by ethnic or group mixing can be dealt with a notary by making a notarial deed, which has been equally understood that the notary deed does not distinguish between groups or ethnicities. The results of subsequent studies explain the constraints of notaries in making of a letter of inheritance, one of which is the notary does not master and does not understand all the provisions of the letter of inheritance in Indonesia.

Keywords: Notary, notary's authority, and letter of inheritance.